

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA TANJUNGPINANG

Nurul Septianti¹, Rumzi Samin², Rudi Subiyakto³
nseptianti095@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstrack

Inclusive Education is an education system that regulates so that children with special needs can complete their education in regular classes with friends of their age, without having to differentiate between classes. In Tanjungpinang City, the implementation of the Inclusive Education Policy is carried out through the Inclusive School at SMPN 15 Tanjungpinang. There are still many obstacles and shortcomings in the implementation of the policy of inclusive education for children with special needs. The purpose of this research is to implement the policy of Inclusive Education for Children with Special Needs in Tanjungpinang City. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The data analysis technique in this study used triangulation techniques. In implementing inclusive education policies for children with special needs, researchers use 6 indicators from the Van Meter Van Horn theory. The results of this study are seen from the dimensions of the Target Standard / Policy Size that are not optimal. Judging from the dimensions of human resources as well as in terms of facilities and infrastructure are not adequate. Judging from the dimensions of the Organizational Characteristics of Implementing the Role of Implementors who do not understand the role of the Attitudes of the Implementors, Implementors accept the Inclusive Education policy. Judging from the dimensions of Inter-Organizational Communication, it is not optimal, due to the lack of socialization of inclusive education in the community. Judging from the dimensions of the influence of the social, economic and political environment, it is not optimal due to the lack of information provided by policy implementers to the community. The conclusion is that the Inclusive Education Policy has not run optimally because in its implementation there are still many shortcomings.

Keywords: *Inclusive Education Policy, Children with Special Needs, SMPN 15 Tanjungpinang City*

I. Pendahuluan

Indonesia dengan berbagai macam suku, ras dan budaya sangat menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang ada pada diri manusia sejak lahir bersifat universal, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, termasuk perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggungjawab dan kewajiban Negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah yang mana upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesempatan penyandang disabilitas agar mendapatkan kehidupan yang sama seperti orang-orang pada umumnya. Ragam Penyandang disabilitas yang di alami oleh seorang difabel membuat ramai menjadi perbincangan pada khalayak umum. Berbagai pandangan Masyarakat umum mengenai penyandang disabilitas yang selalu di hiraukan dari kegiatan sosialisasi di masyarakat yang terkadang membuat penyandang disabilitas menjadi terkucilkan dan bahkan berujung pada semakin terbatasnya ruang gerak mereka di tengah masyarakat. Apa yang di dapatkan khalayak umum mengenai kesejahteraan Ekonomi, dan aspek lainnya belum seutuhnya didapatkan oleh Penyandang disabilitas dikarenakan fasilitas yang tersedia masih terbatas bagi penyandang disabilitas sehingga menyulitkan penyandang disabilitas melakukan kegiatan mandiri. Kota Tanjungpinang memiliki Jumlah penyandang disabilitas di Tahun 2019 dan 2020 dan selalu bertambah yang membuat para Penyandang disabilitas masih jauh dari kesejahteraan. Hal itu dapat di lihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Penyandang Disabilitas tahun 2019 dan 2020 di Kota Tanjungpinang

No	Klasifikasi	2019	2020
1	Autis	6	8
2	Down Syndrom	5	4
3	ODK Berat	45	63
4	Tuna Daksa	215	222
5	Tuna Daksa & Tuna Grahita	8	7
6	Tuna Daksa & Tuna Rungu	6	5
7	Tuna Grahita	24	24
8	Tuna Netra & Tuna Rungu	4	4
9	Tuna Rungu	3	3
10	Tuna Rungu & Tuna Wicara	90	112
11	Tuna Wicara	7	10
	Jumlah	521	554

Sumber Data : Dinas Sosial, 2021.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya penyandang disabilitas di kota tanjungpinang menimbulkan Permasalahan yang sangat kompleks. Penyandang disabilitas selalu menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum Salah satunya, Layanan Pendidikan. Tujuan Negara Indonesia yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945 berbunyi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah membuat berbagai program pendidikan dengan tujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk kehidupan dimasa depan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan melalui sistem pendidikan di Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang No.20 tahun 2003. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam menciptakan kemajuan sebuah negara, termasuk kebijakan yang mengatur tentang anak

berkebutuhan khusus yang harus mendapat perlakuan sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam hal pendidikan, dimana hak penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Peraturan lain yang mengatur tentang penyandang disabilitas mendapatkan hak pendidikan nya yaitu Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 1 tersebut bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa harus mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya serta pendidikannya dapat diselenggarakan secara inklusif.

Pendidikan Inklusif merupakan sistem pendidikan yang mengatur supaya anak berkebutuhan khusus dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya, tanpa harus dibedakan kelasnya. Menurut Garnida (2015:48) pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang membuat nyaman bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya anak berkebutuhan khusus akan digabungkan dengan siswa di dalam lingkungan yang sama. Pelaksanaan mengenai pendidikan khusus di jelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yaitu tentang pemberian kesempatan atau peluang khusus kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan). Adanya pendidikan inklusif ini menjadikan bahwa pendidikan dapat diakses dengan sangat mudah oleh semua anak yang memperoleh pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Proses yang ada pada pendidikan inklusif sama diberikan seperti anak normal pada umumnya walaupun terdapat keterbatasan yang menghambat proses pembelajaran mereka. Cakupan pendidikan inklusif yang sangat luas ini akan memberikan dampak yang sangat luas pada anak berkebutuhan khusus supaya mereka tidak dijauhi maupun diasingkan oleh peserta didik lainnya.

Di kota Tanjungpinang pelaksanaan pendidikan inklusif yang melibatkan Anak berkebutuhan Khusus masih belum berjalan maksimal dikarenakan perlu adanya regulasi untuk pendampingan dan perhatian dalam hal proses pengajaran untuk memperoleh layanan Pendidikan inklusif dikarenakan penting untuk melanjutkan masa depan anak. Anak berkebutuhan khusus seharusnya di berikan kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan seperti anak pada umumnya. Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, dan berkebutuhan khusus berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan di sekolah yang sudah di tunjuk oleh pemerintah kota Tanjungpinang dapat menerima anak berkebutuhan khusus. Untuk Penunjukan sekolah inklusif tidak hanya sembarangan dikarenakan sekolah reguler yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi acuan sekolah inklusif. Kota Tanjungpinang terdapat penunjukkan sekolah inklusif yang menerima anak berkebutuhan khusus di kota Tanjungpinang.

Tabel 2. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Tanjungpinang

No	Nama Sekolah	Alamat	Klasifikasi Disabilitas	Jumlah Siswa
1	SMPN 15 Kota Tanjungpinang	JL. BOROBUDUR, Kampung Baru, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjungpinang	-Autisme -Tuna Daksa -Tuna Grahita -Disleksia	1 2 2 2
Total				7

Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2021(telah diolah kembali)

Dari data yang di dapat hanya beberapa sekolah saja yang menerima ada berkebutuhan khusus namun dengan derajat (Klasifikasi Penyandang disabilitas ringan) padahal anak berkebutuhan khusus tanpa di bedakan klasifikasi penyandang disabilitas nya berhak mendapatkan pendidikan inklusif.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak berkebutuhan Khusus di Kota Tanjungpinang?** Adapun tujuan dari penelitian ini ialah “Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Tanjungpinang”

II. Metode Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011:6). Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang khususnya di Dinas Pendidikan dan SMPN 15 Kota Tanjungpinang. Fokus penelitian ini adalah Kebijakan Pendidikan Inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi literatur. Dan informan yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini yaitu, Kabid PSMP Dinas Pendidikan, Kabid Rehabilitasi Anak, Guru Pendidikan Inklusif serta Kepala Sekolah di sekolah inklusif. Adapun Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Kurniawan (2014:10), adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah yang di tujuk menjadi sekolah inklusif. Hal ini bertujuan untuk Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuannya; dan Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang sudah cukup mewakili dengan mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan peneliti. Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya yang mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Kriteria pendidikan inklusif yang dilaksanakan di SMPN 15 Kota Tanjungpinang mengacu pada buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh Direktorat PLB. Kriteria sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua)
2. Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah
3. Tersedia guru pendidikan khusus (GPK) dari PLB (guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain)
4. Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar.
5. Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan
6. Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak.
7. Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif
8. Sekolah tersebut telah terakreditasi

Berdasarkan Kriteria Tersebut SMPN 15 Kota Tanjungpinang Memenuhi Standar Kriteria Dari Penetapan Sekolah Inklusif Sehingga Menjadi Sekolah Rujukan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Masuk Di Sekolah Reguler. Untuk melakukan Implementasi kebijakan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn yaitu Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Kebijakan Pendidikan Inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa normal maupun siswa difabel untuk mengikuti proses pembelajaran dalam satu lingkungan yang sama. Sistem tersebut memungkinkan siswa difabel yang mengalami disabilitas untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah reguler sehingga Tujuan Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk menghilangkan diskriminasi dan pemerataan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat tercapai. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Kebijakan Pendidikan Inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa normal maupun siswa difabel untuk mengikuti proses pembelajaran dalam satu lingkungan yang sama. Pendidikan inklusif yang di tuju untuk anak berkebutuhan khusus sudah tercapai dari segi standar ukuran ukuran/sasaran tujuan kebijakan namun belum berjalan optimal di lihat dari kebijakan ini, dari segi sasaran kebijakan yang di nilai belum mencukupi untuk anak berkebutuhan khusus masuk di sekolah inklusif dikarenakan hanya sebagian anak penyandang disabilitas dengan klasifikasi ringan dapat masuk ke sekolah inklusif

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pada pendidikan Inklusif sumber daya yang disediakan mulai dari sumber Daya Manusia, Waktu dan Financial sudah dipersiapkan Hanya saja belum optimal. Kurangnya penyediaan guru di sekolah inklusif menjadi keterbatasan anak berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah di sekolah Inklusif, seharusnya Setelah sebuah sekolah regular ditetapkan layak sebagai sekolah inklusif, dimana siswanya terdiri dari anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus, maka sekolah tersebut membutuhkan peranan tenaga kependidikan, khususnya guru yang merupakan faktor yang paling menentukan. Tidak saja guru kelas dan guru mata pelajaran yang dikondisikan memahami karakteristik keberagaman peserta didiknya, tetapi dalam upaya mengoptimalkan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sekolah tersebut membutuhkan pihak-pihak pendukung lain yang diperlukan bagi keberlangsungan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah regular tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pada pendidikan Inklusif sumber daya yang disediakan mulai dari sumber Daya Manusia, Waktu dan Financial sudah dipersiapkan Hanya saja belum optimal. Sekolah Inklusif yang sudah di tunjuk untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif berhak mendapatkan bantuan untuk menunjang aksesibilitas penyandang difabel untuk belajar. SMPN 15 sebagai sekolah Inklusif mendapatkan bantuan Pemerintah pendidikan inklusif di tahun 2019 Jika dilihat dari sumber daya financial berupa sarana dan prasarana yang di sediakan di sekolah inklusif sudah disiapkan dan untuk anggarannya di tahun 2019 diberikan bantuan pemerintah untuk pendidikan inklusif yang di tujukan untuk pendidikan inklusif, namun dari sekolah sendiri sudah mendapatkan biaya bantuan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Gambar 4.1 Keadaan Sekolah Inklusif



Berdasarkan Hasil Wawancara, penyediaan guru di sekolah inklusif menjadi keterbatasan anak berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah di sekolah Inklusif, seharusnya Setelah sebuah sekolah regular ditetapkan layak sebagai sekolah inklusif, dimana siswanya terdiri dari anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus, maka sekolah tersebut membutuhkan peranan tenaga kependidikan, khususnya guru yang merupakan faktor yang paling menentukan. Tidak saja guru kelas dan guru mata pelajaran yang dikondisikan memahami karakteristik keberagaman peserta didiknya.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan suatu program. Menurut Van Meter dan Van Horn, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana.

Karakteristik organisasi pelaksana terdapat dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan program. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksana. Pada Kebijakan Pendidikan Inklusif ini karakteristik organisasi pelaksana digunakan untuk melihat bagaimana keterlibatan Organisasi Informal maupun Informal untuk menunjang kesuksesan Pendidikan Inklusif ini. Peran antar instansi dalam menjalankan kewenangannya untuk ikut menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu adanya koordinasi antar instansi sehingga peran masing-masing instansi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif dapat tercapai. Dapat dilihat bahwa Peran dinas sosial maupun pendidikan mempunyai peran masing-masing sebagai pengawas maupun mengontrol jalannya Implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini namun karena kurangnya koordinasi serta pengawasan yang dilakukan dengan SMPN 15 Kota Tanjungpinang sebagai sekolah inklusif maka akan berpengaruh dengan jalannya pendidikan inklusif.

Sikap Para Pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan kecenderungan para pelaksana menunjukkan pada karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan atau program. Sikap para implementor sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan kita harus bisa melihat seberapa besar kekuasaan dari pembuat kebijakan dan pelaksana program kebijakan sehingga semakin jelas tujuan yang ingin dicapai. Hanya saja jika semakin besar kepentingan yang mempengaruhi maka akan sedikit susah untuk mengimplementasikan kebijakan. Van Meter dan Horn dalam Winarno (2012:57) mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan yakni:

1. Respon Implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan
2. Kognisi (pemahaman) para agen pelaksana terhadap kebijakan
3. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan suatu kebijakan.

Guru maupun dari dinas pendidikan serta instansi lain di Kota Tanjungpinang merespon dengan baik adanya pendidikan inklusif ini. Namun sebagai pihak pelaksana dari dinas pendidikan Kota Tanjungpinang sendiri berupaya untuk mempersiapkan sarana dan prasarana dan mengembangkan lagi pendidikan inklusif supaya lebih banyak diketahui oleh orang tua siswa khususnya yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Sikap para implementor sangat dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan pendidikan inklusif. Respon yang baik dari berbagai instansi maupun stakeholder lainnya dapat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan, namun diakrenakan kebijakan pendidikan inklusif ini mendapat penolakan dari beberapa sekolah yang tidak mampu untuk menyediakan aksesibilitas bagi anak difabel untuk mendapatkan pendidikan.

Komunikasi Antar Organisasi

Keberhasilan dari implementasi kebijakan atau program dapat terwujud apabila komunikasi yang terjalin antara implementor maupun implementor lainnya (internal) dan juga kepada masyarakat (eksternal) berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran maupun tujuan program. Berikut Sekolah yang bekerja sama dengan SMPN 15 sebagai sekolah inklusif

Tabel 3. Sekolah yang mensosialisasikan pendidikan inklusif di Kota Tanjungpinang

No	Nama Sekolah	Alamat
1.	SMPN 3 Kota Tanjungpinang	Jl. Sawi No.16 Bukit Cermin Kelurahan Tanjungpinang barat
2.	SMPN5Kota Tanjungpinang	Jl. Ir. H. Juanda No. 3, Bukit Bestari, Tj. Pinang Timur, Bukit Bestari,
3.	SMPN10Kota Tanjungpinang	Tj. Unggat, bukit bestari, kota tanjung pinang, kepulauan riau
4.	SMP Hang Tuah	Jl. Tugu pahlawan, tanjungpinang barat, kec. Tanjung pinang barat,
5.	SDN 014 Tanjungpinang barat	Jl. Borobudur No 29 Bukit Cermin, Tanjungpinang
6.	SDN 004 Tanjungpinang Barat	Jl. Bakar Batu No. 47.A <i>Tanjung Pinang Barat</i>

Sumber Data : SMPN 15 Kota Tanjungpinang,2021.

Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana sudah berjalan namun tidak Optimal kurang nya sosialisasi dan koordinasi serta kurangnya informasi yang menyeluruh yang di berikan oleh implementor membuat kebijakan pendidikan inklusif belum berjalan efektif.

Analisis Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Pengaruh Lingkungan Ekonomi social dan Politik berpengaruh untuk menunjang keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif ini peran pemerintah serta orang tua Haruslah sejalan untuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan.dari segi ekonomi faktor banyaknya sekolah inklusif yang akan membatasi penerimaan anak berkebutuhan khusus juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi anak dalam mendapatkan pendidikan, karena jika anaknya tidak dapat bersekolah di sekolah negeri yang tidak memungut biaya apapun dari orang tua, maka anak tersebut tidak dapat bersekolah karena orang tua yang tidak mampu untuk membiayai anaknya sekolah pada sekolah inklusif swasta atau SLB. adanya pendidikan inklusif melalui sekolah inklusif ini dapat memudahkan anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di lingkungan terdekatnya. Lingkungan social dan ekonomi ini sebenarnya menunjuk kondisi atau keadaan lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi itu sendiri. Dalam Hal ini Implementasi Kebijakan untuk menilai sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan social ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari Kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.sekalipun dampak dari sistem sistem ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan yang menjadi perhatian kecil, system ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan badan pelaksana

IV. Kesimpulan

Kesimpulan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif bagi Anak berkebutuhan Khusus yang dijalankan melalui peraturan menteri pendidikan nasional No 70 Tahun 2009 masih belum berjalan optimal. Adapaun secara rinci dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari Indikator Tujuan dan sasaran Kebijakan, pencapaian tujuan dari pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus masih belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan pelaksanaannya masih belum sesuai permendiknas. Berdasarkan wawancara, terdapat kekurangan yang menyebabkan kebijakan ini belum terlaksana secara maksimal masih banyak anak berkebutuhan khusus,guru maupun orang tua yang belum paham dari kebijakan pendidikan inklusif ini sehingga pencapaian dari tujuan kebijakan pendidikan inklusif ini belum tercapai

2. Dari Indikator sumber daya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Guru Pendamping khusus yang belum memadai membuat implementasi kebijakan pendidikan inklusif terkendala, guru yang menjadi guru pendamping khusus di sekolah inklusif adalah guru mata pelajaran dan wali kelas. Dari segi penyediaan sarana dan prasarana dari kebijakan sudah ada namun belum lengkap khususnya di SMPN 15 Kota Tanjungpinang.
3. Pada Indikator Karakteristik Organisasi Pelaksana Dapat di lihat bahwa Karakteristik organisasi pelaksana mempengaruhi jalannya Implementasi kebijakan. Peran yang belum di pahami oleh dinas Pendidikan serta kurangnya koordinasi serta pengawasan yang di lakukan oleh dinas pendidikan kota tanjungpinang maupun dengan dinas sosial dengan SMPN 15 Kota Tanjungpinang sebagai sekolah inklusif maka akan berpengaruh dengan jalannya pendidikan inklusif
4. Dari Indikator Sikap Para pelaksana guru maupun dari dinas pendidikan serta orang tua kota tanjungpinang merespon dengan baik adanya pendidikan inklusif ini Namun Ada sebagian Sekolah yang belum tahu dan belum siap menerima anak berkebutuhan khusus untuk masuk di sekolah regular karena takut akreditasi dari sekolah mereka menjadi tidak baik di karenakan adanya anak berkebutuhan khusus
5. Dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi Pendidikan inklusif ini masih perlu koordinasi dengan instansi lainnya untuk menunjang keberhasilan pendidikan inklusif dan Kurangnya sosialisasi menyebabkan pendidikan inklusif ini hanya di ketahui oleh beberapa orang saja
6. Dari Indikator Pengaruh Lingkungan Sosial, Ekonomi , Politik, berpengaruh untuk menunjang keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif ini peran pemerintah serta orang tua Haruslah sejalan untuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan.dari segi ekonomi adanya pendidikan inklusif ini dapat memudahkan anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di lingkungan Terdekatnya. Peran Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan memberikan bantuan kepada sekolah inklusif berpengaruh dengan jalannya implementasi

V. Daftar Pustaka

Buku

Abidin, Said Zainal, 2012. Kebijakan Publik Jakarta: Salemba Humanika

Agus, Erwan P. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Gava Media

Agustin, I. 2016. Manajemen sekolah inklusi di Sekolah Dasar Sumber Sari 1 Kota Malang.

Education and Human Development Journal. 1(1) : 27-33.

Angga,Saputra.2016.Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif.Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini.Vol 1 No 3

Choiri, S. Abdul & Yusuf Munawir. 2009. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif.

Inti Media Surakarta: Surakarta

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*.Jakarta

Jurnal

Asyhabuddin. 2008. Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto.

INSANIA Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan.13 (3); 406-519.

Barokah, Siti “Moralitas Peserta Didik Pada Pendidikan Inklusi : Studi Kasus pada Sekolah Inklusi SD Hj.Isriati Semarang,” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008

Direktorat PLB. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Menenal Pendidikan Terpadu).

Jakarta: Depdiknas, 2004

- Fuadi, K. 2011. Analisis kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Kadir, A. 2015. Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1): 2-22.

Undang-Undang

Undang-Undang No.20 tahun 2003

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

VI. Ucapan Terimakasih

Terimakasih saya ucapkan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dan SMPN 15 Tanjungpinang dan guru serta masyarakat yang telah menerima saya melakukan penelitian dan telah banyak membantu serta memberi dukungan mendapatkan data. Penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. H.Rumzi Samin S.Sos.,M.Si selaku ketua pembimbing dan Bapak Dr.Rudi Subiyakto,S.Sos.,MA selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.